# DINAS KEBUDAYAN
## PROVINSI SUMATERA BARAT

# L A P O R A N
# KEUANGAN
## BERBASIS AKRUAL
## DRAFT

**TAHUN ANGGARAN 2024**


**Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3**
Jl. Diponegoro No. 31 Padang 25117, Telp. (0751)-8950970 | 8957027
E-mail : disbud@sumbarprov.go.id | Website : disbud.sumbarprov.go.id

# PENDAHULUAN

## 1.1 Informasi Umum _____

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2024, serta sesuai dengan tugas pokok Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu **"Terwujudnya tata kehidupan yang berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"**

Misi Dinas Kebudayaan adalah :

1. Mewujudkan penguatan dan pelestarian adat & nilai-nilai tradisional;
2. Mewujudkan diplomasi budaya serta pergelaran event berskala nasional dan internasional;
3. Mewujudkan pelestarian bahasa dan sejarah Minangkabau;
4. Mewujudkan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya sebagai warisan budaya dunia.

Tujuan dari Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya;
2. Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat, bahasa / sastra Minangkabau serta nilai-nilai tradisi;
3. Terwujudnya kerjasama dan diplomasi budaya yang berkelanjutan;
4. Terwujudnya peningkatan, pengembangan serta perlindungan museum dan cagar budaya.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya pembinaan objek pemajuan kebudayaan;
2. Meningkatnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan;
3. Meningkatnya perlindungan objek pemajuan kebudayaan;
4. Meningkatnya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan;

## 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan _____

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2023. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Neraca.
3. Laporan Operasional (LO).
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
2. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
b. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali *(trace back)* pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

### 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan _____

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
18. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

### 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan _____

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2024 meliputi hal-hal berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

**BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

**BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja

5.2. Penjelasan Neraca
    5.2.1. Aset
    5.2.2. Kewajiban
    5.2.3. Ekuitas Dana
5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
    5.3.1. Pendapatan LO
    5.3.2. Beban
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

**BAB VII PENUTUP**

## BAB II
## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN SERTA PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1 Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 6 (Enam) Program dengan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Program Pengembangan Kebudayaan.
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
4. Program Pembinaan Sejarah.
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
6. Program Pengelolaan Permuseuman.

### 2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran *(output)* yang maksimum. Pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2024 ditempuh dengan pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

| NO | KEGIATAN | | SUB KEGIATAN | | TARGET KINERJA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 dokumen) |
| | | 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2 laporan) dan tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2 laporan) |
| 2 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN lingkup dinas sebanyak 75 orang |
| | | 2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan |

| I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO** | **KEGIATAN** | **SUB KEGIATAN** | | **TARGET KINERJA** |
| | | | | sebanyak 12 bulan |
| | | 2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - Terlaksananya Pelaporan Keuangan OPD yakni laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan sebanyak 14 laporan |
| **3** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daer** | 3.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - Jumlah PNS/ Karyawan dan Karyawati Dinas Kebudayaan yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 71 orang |
| **4** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | 4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | - Terpenuhinya jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 20 paket |
| | | 4.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Terpenuhinya paket bahan logistik kantor sebanyak 35 paket |
| | | 4.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Terpenuhinya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 5 paket |
| | | 4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang sejumlah 5 dokumen |
| | | 4.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Terpenuhinya laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sejumlah 36 laporan |
| **5** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 5.1 | Pengadaan Mebel | - Terpenuhinya kebutuhan mebel sejumlah 2 paket |
| **6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | 6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat sebanyak 1000 laporan |

| I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **KEGIATAN** | | **SUB KEGIATAN** | | **TARGET KINERJA** |
| | **Daerah** | 6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sejumlah 12 laporan |
| | | 6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sejumlah 3 laporan |
| **7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 12 unit |
| | | 7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | Jumlah pemeliharaan kendaraan dan mesin sebanyak 14 unit |

| II. Program Pengembangan Kebudayaan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **KEGIATAN** | | **SUB KEGIATAN** | | **TARGET KINERJA** |
| **1** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | 1.1 | Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | - | Terkelola karya budaya yang dilestarikan sejumlah 8 karya budaya, Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sejumlah 10 objek, serta jumlah kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terkelola dengan baik sejumlah 8 karya budaya. |
| | | 1.2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | - | Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan |
| **2** | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | 2.1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | - | Terlaksananya pelindungan pengembangan dan pemanfaatan lembaga adat |
| | | 2.2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | - | Terlaksannya pembinaan terhadap Lembaga Tradisional dan Sumber Daya Manusia Adat |
| **3** | **Pelestarian** | 3.1 | Pelindungan, Pengembangan, | - | Terlaksananya pelindungan |

| II. Program Pengembangan Kebudayaan | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO** | **KEGIATAN** | | **SUB KEGIATAN** | **TARGET KINERJA** |
| | **Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (UPTD Taman Budaya)** | | Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | pengembangan dan pemanfaatan lembaga adat |
| | | 3.2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | - Terlaksannya pembinaan terhadap Lembaga Tradisional dan Sumber Daya Manusia Adat |
| | | 3.3 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | - |

| III. Program Pengembangan Kesenian Tradisional | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO** | **KEGIATAN** | | **SUB KEGIATAN** | **TARGET KINERJA** |
| **1** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | 1.1 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | - Terlaksananya pembinaan terhadap generasi muda dalam melestarikan kesenian tradisional. |
| | | 1.2 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | - Terlaksananya Proses Standarisasi Sumber Daya Manuasia Kesenian Tradisional. |
| | | 1.3 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | - Terlaksananya Pembinaan terhadap lembaga kesenian tradisional |

| IV. Program Pembinaan Sejarah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **KEGIATAN** | | **SUB KEGIATAN** | **TARGET KINERJA** |
| **1** | **Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi** | 1.1 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi | - Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga sejarah lokal (lembaga) dan peningkatan kapasitas SDM sejarah lokal (10 orang) |
| | | 1.2 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | - Tersedianya data dan informasi sejarah (2 dokumen) dan tersedianya sarana/ media data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat (1 media) |

| V. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO** | **KEGIATAN** | | **SUN KEGIATAN** | **TARGET KINERJA** |
| **1** | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | 1.1 | Penetapan Cagar Budaya | - Terlaksananya objek diduga cagar budaya yang didaftarkan (21 objek cagar budaya) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | 2.1 | Pelindungan Cagar Budaya | - Terlaksananya cagar budaya yang dilindungi sebanyak 15 cagar budaya |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **VI. Program Pengelolaan Permuseuman** | | |
| **NO** | **KEGIATAN** | | **SUB KEGIATAN** | **TARGET KINERJA** |
| **1** | **Pengelolaan Museum Provinsi** | 1.1 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | - Terlaksananya Pengembangan koleksi museum sebanyak 7 koleksi, terlindunginya koleksi museum sebanyak 700 koleksi dan terlaksananya koleksi museum yang dimanfaatkan sebanyak 500 koleksi |
| | | 1.2 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | - Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM permuseuman sebanyak 2 orang |
| | | 1.3 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | - Terlaksananya aktifitas museum yang melibatkan masyarakat sebanyak 26 kegiatan, dan tersedianya sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum sebanyak 1 media |
| | | 1.4 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | - Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana museum sebanyak 15 paket |

**BAB III**
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan _____**

Dalam tahun anggaran 2024, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mendapat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.482.100.355,00,- dengan realisasi sebesar Rp.355.448.000,-. Alokasi belanja sebesar Rp. 31.812.054.679,00,- di pagu awal dan pada pagu perubahan anggaran sebesar Rp.33.931.381.189,03,- Dengan realisasi sebesar Rp.32.028.260.450,00.

Berikut capaian kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dalam Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

**PENDAPATAN DAERAH**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Retribusi Sewa Bangunan | Rp. | 29.500.000,00- |
| - | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Raga | Rp. | 452.600.355,00- |
| | **Jumlah .....** | **Rp** | **482.100.355,00,-** |

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera barat sebesar Rp.355.448.000,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 73,73% dari target pendapatan yang sebesar Rp.482.100.355,- yang terdiri dari Retribusi Sewa Bangunan sebesar Rp.29.500.000,- dan dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp.452.600.355,-.

**BELANJA DAERAH**

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Belanja Pegawai | Rp. | 9.591.176.194,00,- |
| - | Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 24.240.863.795,03,- |
| - | Belanja Modal | Rp. | 99.341.200,00,- |
| | **Jumlah .....** | | **33.931.381.189,03,-** |

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 32.028.260.450,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 94,39%. Untuk Belanja Pegawai Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.591.176.194,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 8.959.084.009,00,- Atau dalam bentuk persentase 93,40%. Untuk Belanja Barang dan Jasa, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 24.240.863.795,03,- telah direalisasikan sebesar Rp. 22.851.377.541,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 94,26%. Untuk Belanja Modal, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 99.341.200,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 99.015.000,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,67%.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

| No | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % | LEBIH/KURANG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BELANJA** | **33,931,381,189.03** | **32,028,260,450.00** | **94.39** | **1,903,120,739.03** |
| **I** | **BELANJA OPERASI** | **33,832,039,989.03** | **31,929,245,450.00** | **94.38** | **1,902,794,539.03** |
| 1 | Belanja Pegawai | 9,591,176,194.00 | 8,959,084,009.00 | 93.41 | 632,092,185.00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 24,240,863,795.03 | 22,970,161,441.00 | 94.76 | 1,270,702,354.03 |
| **II** | **BELANJA MODAL** | **99,341,200.00** | **99,015,000.00** | **99.67** | **326,200.00** |
| 1 | Belanja Tanah | - | - | - | - |
| 2 | Belanja Peralatan & Mesin | 15,341,200.00 | 15,015,000.00 | 97.87 | 326,200.00 |
| 3 | Belanja Gedung & Bangunan | - | - | - | - |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan | - | - | - | - |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 100.00 | - |

*(dalam satuan rupiah)*

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**.

Dengan total anggaran Rp. 31.812.054.679,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13,501,782,851,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 12,820,440,509,00,- (94,95%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

   **Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

   Hasil : Tersusunnya Renstra, Renja, RKA dan DPA OPD

   Jumlah pagu dana : Rp. 47,550,000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 47,154,900,00 (99,17%) dan sisa dana sebesar Rp. 395.100,00,- merupakan efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi fisik mencapai 100%.

   **Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

   Hasil : Terlaksananya penyajian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

   Pagu dana : Rp. 7.500.000,00,-. Pagu setelah perubahan tetap sebesar Rp. 7.500.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 7.499.900,00,- (99,99%) dan sisa dana sebesar Rp. 100,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

   **Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

   Hasil : Terlaksananya penyajian Laporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

   Pagu dana dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. : Rp. 37.000.100,00,. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 34.656.299,00,- (93,67%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.343.801,00,- merupakan merupakan efisiensi penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan. Realisasi fisik mencapai 100%.

   **Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

   Hasil : Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

   Pagu dana: Rp. 9.598.687.438,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 9.247.976.194,00,-. Dilaksanakan secara swakelola dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8,619,159,509,00 (93,20%), dengan sisa dana sebesar Rp. 628.816.685,00,- merupakan TPP Bulan Desember 2024 dan penambahan tunjangan kinerja berdasarkan beban dan kondisi kerja pada pejabatan fungsional tertentu yang belum direalisasikan. Realisasi fisik mencapai 100%

   **Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

   Hasil : Tersedianya honorarium ASN lingkup Dinas.

   Pagu dana: Rp. 347.049.900,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 264,999,900,00,-. Dilaksanakan secara swakelola dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 343.466700,00. (98,97%) dengan sisa dana sebesar Rp. 3,583,200. Realisasi fisik mencapai 100%.

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

   **Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

   Hasil : Meningkatnya jumlah ASN yang mendapatkan Bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan.

   Pagu dana: Rp. 15.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 20.500.000,00. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 18.800.000,00,- (91,71%) dengan sisa dana sebesar Rp. 1.700.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

   **Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor.**

   Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kebutuhan komponen listrik kantor.

   Pagu dana: Rp. 14.474.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 14.731.000,00,- (99,89%) dengan sisa dana sebesar Rp. 16.500,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan Untuk UPTD Taman

Budaya, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi fisik 100%.

**Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Hasil : Terpenuhinya kebetuhan bahan logistik kantor.

Pagu dana: Rp. 70.008.390,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 69.344.939,00,- (99,05%) dengan sisa dana sebesar Rp. 663.451,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Untuk UPTD Taman Budaya Pagu dana: Rp. 15.000.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 14.999.400,00,- (99,99%) dengan sisa dana sebesar Rp. 600,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

**Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Hasil : Tersedianya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan.

Pagu dana: Rp. 5.000.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 4.894.100,00,- (97,88%) dengan sisa dana sebesar Rp. 106.000,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Pada UPTD Taman Budaya pagu dana: Rp. 4.970.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 4.960.000,00,- (99,8%) dengan sisa dana sebesar Rp. 10.000,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Pada UPTD Museum Adityawarman pagu dana: Rp. 670.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 670.000,00,- (100%). Realisasi fisik mencapai 100%.

**Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Pagu dana: Rp. 4.440.000,00,- Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 4.000.000,00,- (90,09%) dengan realisasi fisik mencapai 100%. UPTD Taman Budaya, pagu dana: Rp. 3.000.000,00,- Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,00,- (100%) dengan realisasi fisik mencapai 100%.

**Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Hasil : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti.

Pagu dana: Rp. 390.307.152,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 469.244.906,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 466.910.978,00,- (99,50%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.333.928,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Untuk UPTD Museum Adityawarman, pagu dana: Rp. 20.000.000,00,- dan pagu anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 46.578.419,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 43.989.770,00,- (94,44%) dengan sisa dana Rp.2.588.649, dan realisasi fisik mencapai 100%. Untuk UPTD Taman Budaya, pagu dana: Rp. 20.000.000,00,- dan dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 18.953.060,00,- (94,77%) dengan sisa dana Rp. 1.046.940,00,- dan realisasi fisik mencapai 100%.

5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   **Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel**

   Hasil : Terpenuhinya kebutuhan mebel

   Pagu dana: Rp. 10.226.200,00,- dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.925.000,00,- (97,05%) dengan sisa dana sebesar Rp. 301.200,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah**

   **Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

   Hasil : Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dinas

   Pagu dana: Rp. 30.000.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 29.250.000,00,- (97,50%) dengan sisa dana sebesar Rp. 750.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Pada UPTD Museum Adityawarman pagu dana: Rp. 2.000.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.000.000,00,- (100%). Realisasi fisik mencapai 100%. Pada UPTD Taman Budaya pagu dana: Rp. 2.500.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.500.000,00,- (100%). Realisasi fisik mencapai 100%.

   **Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

   Hasil : Tersedianya jasa listrik, internet dan kebutuhan komunikasi kantor.

   Pagu dana: Rp. 449.379.999,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 459.379.999,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 456.145.690,00,- (99,30%) dengan sisa dana sebesar Rp. 3.234.309,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Pada Museum Adityawarman pagu dana: Rp. 60.000.000,00,- dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 47.069.000,00,- Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 47.067.969,00,- (99,99%) dan realisasi fisik adalah 100% dengan sisa dana sebesar Rp. 1.031,00,-.

**Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Hasil : Terpenuhinya jasa kebersihan, pengamanan, PTT dan supir kantor.

Pagu dana: Rp. 2,300,000,000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.334.626.745,00,-. Dilaksanakan secara *e-purchasing* (tenaga pengaman dan kebersihan), swakelola (sopir, honorarium tenaga ahli, rohaniawan, narasumber dan tim pokja pengadaan) serta PTT. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.326.570.645,00,- (99,65%) dengan sisa dana sebesar Rp. 8.056.100,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   **Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

   Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

   Pagu dana: Rp. 120.000.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 119.403.700,00,- (99,50%) dengan sisa dana sebesar Rp. 596.300,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

   **Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

   Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Gedung Kantor.

   Pagu dana: Rp. 115,030,000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 65.030.000,00,-. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 61.707.500,00,- (94,89%) dengan sisa dana sebesar Rp. 3.322.500,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Pada UPTD Taman Budaya Pagu dana: Rp. 15.030,000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00,- (99,80%) dengan sisa dana sebesar Rp. 30.000,00,- dengan realisasi fisik mencapai 100%.

**2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**.

Dengan total anggaran Rp. 12.678.718.000,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.720.078.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.745.898.435,00,- (92,90%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

   **Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**

   Hasil : Terkelolanya kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yakni sebanyak 8 karya budaya dan terlindunginya warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan serta pencatatan penetapan warisan budaya takbenda Indonesia (WBTbI).

   Pagu dana: Rp. 4.595.500.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 4.390.860.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.887.958.392,00,- (88.55%) dengan sisa dana sebesar Rp. 502,901,608,00,- dikarenakan adanya kelebihan sisa tender dan efesiensi perjalanan dinas.

   **Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan**

   Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

   Pagu dana: Rp. 601,105,000,00,-. dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 569,787,500,00,- (94,79%) dengan sisa dana sebesar Rp. 31,317,500,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

2. **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**

   **Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Taman Budaya Sumatera Barat)**

   Hasil : Terlaksananya workshop seni budaya (6 kegiatan), pameran seni budaya (8 kegiatan), pagelaran seni budaya (8 kegiatan), Diskusi seni budaya (8 kegiatan), dan beberapa aktivitas tradisi budaya lainnya.

   Pagu dana: Rp. 2.000.000.000,00,- Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.960.888.577,00,- (98,04%) dengan sisa dana sebesar Rp. 39.111.423,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

   **Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Taman Budaya Sumatera Barat)**

   Hasil : Terlaksananya festival kesenian tradisional sejumlah 8 aktivitas kesenian.

   Pagu dana: Rp. 2.698.500.000,00,-. dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 3.054.500.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.909.123.972,00,- (95,24%) dengan sisa dana sebesar

Rp. 145.376.028,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

**Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan (Taman Budaya Sumatera Barat)**

Hasil : Terlaksananya pemberian anugerah kebudayaan Sumatera Barat kepada 7 orang, terlaksananya pemberian apresiasi kepada seniman/ budayawan Sumatera Barat kepada 8 Sanggar, dan terlaksananya apresiasi musik sejumlah 1 kegiatan.

Pagu dana: Rp. 419.666.199,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 359.086.400,00,- (85,56%) dengan sisa dana sebesar Rp. 60.579.799,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

3. **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

   **Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat**

   Hasil : Terlaksannya pembinaan Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat sejumlah 2580 orang dan 142 lembaga adat.

   Pagu dana: Rp. 1.940.500.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 2.718.771.600,00,-. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.564.409.959,00,- (94,32%) dengan sisa dana sebesar Rp. 154,361,641,00,- dikarenakan adanya efesiensi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan. Realisasi fisik mencapai 100%.

**3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**.

Dengan total anggaran Rp. 2.266.500.000,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.356.499.999,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3,304,713,626,00,- (98.46 %). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

   **Sub Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional**

   Hasil : Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dalam berbagai kegiatan

   Pagu dana: Rp. 465.500.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 655.500.000,00,-. Dilaksanakan secara kontaktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 648.982.288,00,- (99.01%) dengan sisa dana sebesar Rp. 6,517,712,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

   **Sub Kegiatan : Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan**

   Hasil : Terlaksananya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi sejumlah 10 orang.

   Pagu dana: Rp. 650.500.000,00,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 648,982,288,00,- (99,01%) dengan Realisasi fisik 100%.

   **Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional**

   Hasil : Terlaksananya jumlah warisan budaya tak benda (lembaga kesenian) yang dilakukan pembinaan dan ditingkatkan kapasitasnya.

   Pagu dana: Rp. 1.150.500.000,00,-. Dan pagu setelah perubahan adalah sebesar RP. 2.050.499.999,00,-. Dilaksanakan seraca swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.014.587.997,00,- (98,25%) dengan sisa dana sebesar Rp. 35.912.002,00,-. Realisasi fisik 100%.

**4. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**

Dengan total anggaran Rp. 601.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 462.093.780,00,- (76,89%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. **Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**

   **Sub Kegiatan : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi**

   Hasil : Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga sejarah lokal (1 lembaga) dan peningkatan kapasitas SDM sejarah lokal (sebanyak 10 orang).

   Pagu dana: Rp. 500.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 500.000,00,- (100,00%)

dengan sisa dana sebesar Rp. 0,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

**Sub Kegiatan : Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah**

Hasil : Tersedianya data dan informasi sejarah (2 dokumen) dan tersedianya sarana/media data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat (1 media).

Pagu dana: Rp. 601.500.000,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 461.593.780,00,- (76,87%) dengan sisa dana sebesar Rp. 138.906.220,00,- dikarenakan adanya rasionalisasi pelaksanaan kegiatan. Realisasi fisik mencapai 100%.

**5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

Dengan total anggaran Rp. 205.500.000,00,- dan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 275.513.236,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 249.510.039,00,- (59,96%). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

**1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**

**Sub Kegiatan : Pelindungan Cagar Budaya**

Hasil : Terlaksananya objek Cagar Budaya yang diregistrasi (10 objek).

Pagu dana: Rp. 200.000.000,00,- dan dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 183.473.539,00,- (91,74%) dengan sisa dana sebesar Rp. 16.526.461,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

**6. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**

Dengan total anggaran Rp. 2.476.507.083,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.445.604.061,46,- (91,74%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

**1. Pengelolaan Museum Provinsi**

**Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu**

Hasil : Terlaksananya Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan sejumlah 700 koleksi unit dan terwujudnya masyarakat yang mengapresiasi museum sebanyak 22.000 Orang .

Pagu dana: Rp. 600.000.000,00,-. dan dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 589.067.530,00,- (98,18%) dengan sisa dana sebesar Rp. 10.932.470,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

**Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman**

Hasil : Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM permuseuman sebanyak 4 orang.

Pagu dana: Rp. 85.000.000,00,-. dan setelah angagaran perubahan adalah sebesar Rp. 81.507.083,00,- dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 78.657.610,00,- (96,50%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.849.473,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

**Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (DAK)**

Hasil : Terlaksananya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum sebanyak 20 aktivitas.

Pagu dana: Rp. 1.575.000.000,00,- dan pagu anggaran perubahan adalah Rp. 1.395.000.000,00. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.380.930.047,00,- (98,99%) dengan sisa dana sebesar Rp. 14.069.953,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

**Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (DAK)**

Hasil : Terlaksananya jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia sejumlah 10 unit.

Pagu dana: Rp. 400.000.000,00,-. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 396.948.874,00,- (99,24%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.849.473,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

**3.2 Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan_____**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90% yaitu :

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor (UPTD - Mesuem Adityawarman)**

   Hasil : Terlaksananya jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Museum Adityawarman sejumlah 10 paket

Pagu dana : Rp. 11.340.000,00,- dan dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 8.200.000,00,- (72,31%) dan sisa dana sebesar Rp. 3.140.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Merupakan rasionalisasi efisiensi penggunaan anggaran pada belanja jasa kantor.

2. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - Museum Adityawarman]**

   Hasil : Terlaksananya paket bahan logistik kantor sejumlah 53 paket.

   Pagu dana: Rp. 21.995.498,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 12.929.550,00,- (58,78%) dengan sisa dana sebesar Rp. 9.065.948,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Merupakan rasionalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran belanja logistik Museum Adityawarman.

3. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD - Mesuem Adityawarman]**

   Hasil : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan (2 dokumen)

   Pagu dana: Rp. 3.000.000,00,- dan pagu anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 3.240.000,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.700.000,00,- (83,33%) dikarenakan adanya rasionalisasi dan efiseiensi kegiatan dengan realisasi fisik mencapai 100%.

4. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - Mesuem Adityawarman]**

   Hasil : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin sejumlah 14 unit.

   Pada UPTD Museum Adityawarman Pagu dana: Rp. 20,010,000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 13,110,000,00,-. Dilaksanakan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 4.850.000,00,- (36,99%) dengan sisa dana sebesar Rp. 8.260.000,00,- yang disebabkan penyesuaian dan efesiensi pada anggaran perubahan 2024. Realisasi fisik mencapai 100%.

5. **Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat**

   Hasil : Terlaksananya perlindungan kepada Objek Pemajuan Kebudayaan (adat) sejumlah 18 objek.

   Pagu dana: Rp. 150.000.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 261,728,400,00,-. Dilaksanakan secara kontraktual dan swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 186.854.225,00,- (71,39%) dengan sisa dana sebesar Rp. 74.874.175,00,- yang disebabkan efisiensi dan penyesuaan pada anggaran perubahan. Realisasi fisik mencapai 100%.

6. **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**

   Hasil : Terlaksananya penetapan Cagar Budaya (10 objek dengan 15 unit cagar budaya).

   Pagu dana: Rp. 5.500.000,00,- dan pagu anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 75.513.236,00,-. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 66.036.500,00,- (87,45,15%) dengan sisa dana sebesar Rp. 9.476.736,00,-. Realisasi fisik mencapai 100%.

# BAB IV
# KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap Tanggal 31 Desember 2015 serta Peraturan Gubernur No 82 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah _____

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

## 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan _____

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah ***basis kas*** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan ***basis akrual*** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

## 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan _____

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**Pengukuran/Penilaian Aset**

**a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

**b. Piutang**

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oelh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

**c. Investasi Jangka Pendek**

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

a. Investasi dalam bentuk surat berharga :
   1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
   2. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya
b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
- Nilai Wajar, abila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

**e. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

**f. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai

wajar/taksiran pada saat perolehan.

**g. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**h. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**i. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

**j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi**

Berdasarkan Pergub No. 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

## 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertamakali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

## 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) _____

### 5.1.1. Penjelasan Pos Pos Pendapatan

| No | Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Retribusi Daerah | 482.100.355,- | 355.448.000,- | 73,73 | 276.092.000,- |

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dan tahun 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 73,73% dari anggarannya.

Pendapatan ini terdiri dari: (rincian objek pendapatan) :

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** | **Rp.** | **37.000.000,-** |
| | **Penyewaan Tanah dan Bangunan** | **Rp.** | **37.000.000,-** |
| | Sewa Aula Museum Adityawarman | Rp. | 34.000.000,- |
| | Sewa Lahan untuk Lapangan Parkir | Rp. | 3.000.000,- |
| - | **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga** | **Rp.** | **318.448.000,-** |
| | **Pelayanan Tempat Rekreasi** | **Rp.** | **318.448.000,-** |
| | Karcis Museum Adityawarman | Rp. | 318.448.000,- |

Penerimaan pendapatan Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2011, No. 70 Tahun 2012, Nomor 95 Tahun 2012, Nomor 61 Tahun 2013 dan No 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan dan Perubahannya, Pergub No. 54 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi.

### 5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

5. Belanja Operasi

| | Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % |
|---|---|---|---|---|
| - | Belanja Pegawai | 9,591,176,194.00 | 8,959,084,009.00 | 93,41% |
| - | Belanja Barang dan Jasa | 24,240,863,795.03 | 22,970,161,441.00 | 94,76% |
| | JUMLAH | 33,832,039,989.03 | 31,929,245,450.00 | 94,38% |

| Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| a. Belanja Pegawai | 9,591,176,194.00 | 8,959,084,009.00 | 93,41% | 9.042.321.917,00 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan tahun 2023. Untuk Tahun 2024 realisasi dari Pos Belanja Pegawai 9,591,176,194.00 (93,41%) dan untuk tahun 2023 Rp. 9.245.282.537,00. Untuk belanja pegawai terdiri dari:

| | Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|
| - | **Belanja Gaji dan Tunjangan** | **5,118,650,933.00** | **4,969,790,126.00** |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 3,705,040,935.00 | 3,651,659,036.00 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 406,421,349.00 | 393,431,746.00 |

| | Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 201,440,000.00 | 199,080,000.00 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 99,960,000.00 | 87,860,000.00 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 105,475,000.00 | 101,585,000.00 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 212,813,176.00 | 207,266,040.00 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 45,420,741.00 | 42,470,257.00 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 73,304.00 | 49,037.00 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 296,565,484.00 | 256,383,706.00 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 7,863,340.00 | 7,501,304.00 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 23,390,219.00 | 22,504,000.00 |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 14,187,385.00 | 0.00 |
| - | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 4,114,862,251.00 | 3,649,369,383.00 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 3,392,699,128.00 | 3,014,796,997.00 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 722,163,123.00 | 634,572,386.00 |
| - | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 357,663,010.00 | 339,924,500.00 |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 14,463,010.00 | 0.00 |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 343,200,000.00 | 339,924,500.00 |
| | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **9,591,176,194.00** | **8,959,084,009.00** |

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto.

| Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| b. Belanja Barang dan Jasa | 24.240.863.795,03 | 22.970.161.441,00 | 94,76 | 30.049.121.728,00 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan tahun 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 94,76% dari anggarannya. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

| NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Belanja Barang dan Jasa** | **24,240,863,795.03** | **22,970,161,441.00** | **94.76** | **30,049,121,728.00** |
| | **Belanja Barang** | **3,677,508,526.03** | **3,369,130,905.00** | **91.61** | **4,578,794,993.00** |
| **A** | **Belanja Barang Pakai Habis** | **3,677,508,526.03** | **3,369,130,905.00** | **91.61** | **4,578,794,993.00** |
| 1 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 100.00 | 1,393,200.00 |
| 2 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 9,175,000.00 | 9,175,000.00 | 100.00 | 14,736,000.00 |
| 3 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 425,287,891.03 | 350,847,290.00 | 82.50 | 399,021,585.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 5 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 9,855,000.00 | 9,815,000.00 | 99.59 | 7,025,000.00 |
| 6 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 72,049,955.00 | 71,482,456.00 | 99.21 | 21,315,230.00 |
| 7 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 8 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 113,912,830.00 | 107,423,790.00 | 94.30 | 135,105,625.00 |
| 9 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 56,270,500.00 | 50,651,900.00 | 90.02 | 81,075,800.00 |
| 10 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1,021,656,540.00 | 891,472,881.00 | 87.26 | 1,098,347,769.00 |
| 11 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 38,780,000.00 | 38,250,000.00 | 98.63 | 32,420,000.00 |
| 12 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 76,144,600.00 | 70,332,300.00 | 92.37 | 82,440,574.00 |
| 13 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2,573,700.00 | 2,293,549.00 | 89.11 | 1,830,000.00 |
| 14 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 36,127,500.00 | 32,670,800.00 | 90.43 | 64,797,700.00 |
| 15 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | 100.00 | 9,000,000.00 |
| 16 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 17 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 160,566,000.00 | 160,160,000.00 | 99.75 | 323,950,000.00 |
| 18 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 94,693,510.00 | 93,210,650.00 | 98.43 | 239,791,510.00 |
| 19 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600,000.00 |
| 20 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 594,578,000.00 | 526,949,289.00 | 88.63 | 663,179,000.00 |
| 21 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61,998,000.00 | 61,255,000.00 | 98.80 | 129,583,000.00 |
| 22 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 612,911,000.00 | 605,293,000.00 | 98.76 | 841,933,000.00 |
| 23 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 100.00 | 7,500,000.00 |
| 24 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 6,750,000.00 | 4,500,000.00 | 66.67 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 144,500,000.00 | 144,000,000.00 | 99.65 | 113,000,000.00 |
| 26 | Belanja Pakaian Teknik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000,000.00 |
| 27 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | 928,500.00 | 928,000.00 | 99.95 | 0.00 |
| 28 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | 100.00 | 39,150,000.00 |
| 29 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 66,000,000.00 | 65,670,000.00 | 99.50 | 85,100,000.00 |
| 30 | Belanja Pakaian Olahraga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,320,000.00 |
| | Belanja Jasa | 15,745,383,424.00 | 15,014,547,636.00 | 95.36 | 16,601,834,418.00 |
| **B** | **Belanja Jasa Kantor** | **11,529,559,148.00** | **11,041,768,209.00** | **95.77** | **10,716,598,931.00** |
| 1 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 736,650,000.00 | 690,850,000.00 | 93.78 | 927,000,000.00 |
| 2 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 165,333,572.00 | 163,979,770.00 | 99.18 | 0.00 |
| 3 | Honorarium Rohaniwan | 19,200,000.00 | 16,600,000.00 | 86.46 | 13,200,000.00 |
| 4 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,387,790.00 |
| 5 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1,178,650,000.00 | 1,112,400,000.00 | 94.38 | 542,700,000.00 |
| 6 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 66,603,582.00 | 66,326,256.00 | 99.58 | 66,126,256.00 |
| 7 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 22,491,592.00 | 22,491,592.00 | 100.00 | 153,453,502.00 |
| 8 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 936,950,000.00 | 887,250,000.00 | 94.70 | 1,323,650,000.00 |
| 9 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 888,659,242.74 | 886,604,364.00 | 99.77 | 849,730,800.00 |
| 10 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 1,205,983,965.63 | 1,204,395,841.00 | 99.87 | 1,243,805,530.00 |
| 11 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 199,918,690.63 | 197,892,301.00 | 98.99 | 177,679,535.00 |
| 12 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 237,750,000.00 | 232,250,000.00 | 97.69 | 287,800,000.00 |
| 13 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 14 | Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 15 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 4,954,795,504.00 | 4,672,911,576.00 | 94.31 | 3,896,312,375.00 |
| 16 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 17 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250,000.00 |
| 18 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 12,000,000.00 | 10,800,000.00 | 90.00 | 10,800,000.00 |
| 19 | Belanja Jasa Jalan/Tol | 1,790,000.00 | 1,029,500.00 | 57.51 | 0.00 |
| 20 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 310,100,000.00 | 289,550,000.00 | 93.37 | 557,900,000.00 |
| 21 | Belanja Tagihan Telepon | 2,361,000.00 | 2,327,273.00 | 98.57 | 2,475,096.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Belanja Tagihan Listrik | 504,087,999.00 | 500,886,386.00 | 99.36 | 562,081,316.00 |
| 23 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 10,680,000.00 | 9,700,000.00 | 90.82 | 16,440,000.00 |
| 24 | Belanja Paket/Pengiriman | 17,250,000.00 | 16,500,000.00 | 95.65 | 675,731.00 |
| 25 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 11,400,000.00 | 10,961,350.00 | 96.15 | 11,068,000.00 |
| 26 | Belanja Lembur | 8,604,000.00 | 8,562,000.00 | 99.51 | 10,663,000.00 |
| **C** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | **15,204,080.00** | **13,810,027.00** | **90.83** | **77,708,487.00** |
| 1 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 6,725,526.00 | 6,703,454.00 | 99.67 | 9,214,716.00 |
| 2 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 403,556.00 | 403,119.00 | 99.89 | 1,387,858.00 |
| 3 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 8,074,998.00 | 6,703,454.00 | 83.01 | 8,666,221.00 |
| 4 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,439,692.00 |
| **D** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | **1,289,945,196.00** | **1,251,361,000.00** | **97.01** | **1,329,380,000.00** |
| 1 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 89,845,000.00 | 81,631,000.00 | 90.86 | 196,685,000.00 |
| 2 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 100.00 | 4,600,000.00 |
| 3 | Belanja Sewa Mebel | 101,640,000.00 | 99,590,000.00 | 97.98 | 153,820,000.00 |
| 4 | Belanja Sewa Alat Pendingin | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 | 100.00 | 25,000,000.00 |
| 5 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 80,500,000.00 | 78,000,000.00 | 96.89 | 0.00 |
| 6 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya | 516,000,000.00 | 505,800,000.00 | 98.02 | 421,900,000.00 |
| 7 | Belanja Sewa Sumber Tenaga | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 | 15,000,000.00 |
| 8 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 446,260,196.00 | 430,640,000.00 | 96.50 | 512,375,000.00 |
| **E** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | **1,484,725,000.00** | **1,390,458,400.00** | **93.65** | **2,716,997,000.00** |
| 1 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | Belanja Sewa Bangunan Gudang | 35,000,000.00 | 31,500,000.00 | 90.00 | 6,000,000.00 |
| 3 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 38,000,000.00 | 31,600,000.00 | 83.16 | 76,500,000.00 |
| 4 | Belanja Sewa Taman | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | Belanja Sewa Hotel | 1,345,925,000.00 | 1,261,558,400.00 | 93.73 | 2,610,497,000.00 |
| 6 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 |
| **F** | **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya** | **150,000,000.00** | **129,900,000.00** | **86.60** | **26,000,000.00** |
| 1 | Belanja Sewa Alat Musik | 132,000,000.00 | 111,900,000.00 | 84.77 | 20,000,000.00 |
| 2 | Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 100.00 | 6,000,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **G** | **Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan** | **1,275,950,000.00** | **1,187,250,000.00** | **93.05** | **1,735,150,000.00** |
| 1 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | Belanja Bimbingan Teknis | 1,255,950,000.00 | 1,167,250,000.00 | 92.94 | 1,735,150,000.00 |
| | Belanja Pemeliharaan | 595,530,000.00 | 581,348,724.00 | 97.62 | 784,077,968.00 |
| **H** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | **201,270,000.00** | **189,999,850.00** | **94.40** | **387,557,029.00** |
| 1 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 108,600,000.00 | 108,442,350.00 | 99.85 | 118,819,129.00 |
| 2 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya | 500,000.00 | 485,000.00 | 97.00 | 0.00 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 44,750,000.00 | 42,690,000.00 | 95.40 | 55,872,900.00 |
| 4 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 14,640,000.00 | 9,637,500.00 | 65.83 | 166,880,000.00 |
| 5 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 6 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,970,000.00 |
| 7 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 18,980,000.00 | 16,780,000.00 | 88.41 | 25,550,000.00 |
| 8 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 13,800,000.00 | 11,965,000.00 | 86.70 | 8,965,000.00 |
| **I** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | **394,260,000.00** | **391,348,874.00** | **99.26** | **396,520,939.00** |
| 1 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 394,260,000.00 | 391,348,874.00 | 99.26 | 396,520,939.00 |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 3,584,881,845.00 | 3,389,144,176.00 | 94.54 | 7,163,855,349.00 |
| **J** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | **3,563,247,000.00** | **3,367,638,842.00** | **94.51** | **5,891,230,382.00** |
| 1 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 3,563,247,000.00 | 3,367,638,842.00 | 94.51 | 5,750,080,382.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,150,000.00 |
| 3 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 21,634,845.00 | 21,505,334.00 | 99.40 | 1,272,624,967.00 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri | 21,634,845.00 | 21,505,334.00 | 99.40 | 1,272,624,967.00 |
| | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 637,560,000.00 | 615,990,000.00 | 96.62 | 920,559,000.00 |
| **K** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | **637,560,000.00** | **615,990,000.00** | **96.62** | **920,559,000.00** |
| 1 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 637,560,000.00 | 615,990,000.00 | 96.62 | 920,559,000.00 |

Sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.270.702.354,03,-.

6. Belanja Modal

| | Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % |
|---|---|---|---|---|
| - | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15,341,200.00 | 15,015,000.00 | 99.87% |
| - | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 100.00% |
| | JUMLAH | 99,341,200.00 | 99,015,000.00 | 99.67% |

| URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % | REALISASI 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **BELANJA MODAL** | **99,341,200.00** | **99,015,000.00** | **99.67** | **375,888,900.00** |
| **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | **15,341,200.00** | **15,015,000.00** | **97.87** | **182,149,900.00** |
| Belanja Modal Alat Besar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| Belanja Modal Alat Bantu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 15,341,200.00 | 15,015,000.00 | 97.87 | 11,199,900.00 |
| Belanja Modal Alat Kantor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,699,900.00 |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 9,841,200.00 | 9,565,000.00 | 97.19 | 2,500,000.00 |
| Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5,500,000.00 | 5,450,000.00 | 99.09 | 0.00 |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| Belanja Modal Alat Komunikasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| Belanja Modal Komputer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,750,000.00 |
| Belanja Modal Komputer Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,750,000.00 |
| Belanja Modal Peralatan Komputer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **193,739,000.00** |
| Belanja Modal Bangunan Gedung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,739,000.00 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,739,000.00 |
| **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | **84,000,000.00** | **84,000,000.00** | **100.00** | **0.00** |
| Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 100.00 | 0.00 |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2024 dan tahun 2023. Realisasi tahun 2024 mencapai 99,67% dari anggarannya. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

| Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15,341,200.00 | 15,015,000.00 | 97.87 | 182,149,900.00 |

| No. | Perkiraan | Jenis Barang | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|
| **A** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | **15,015,000.00** |
| | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | 15,015,000.00 |
| | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | a. Belanja mebel (meja), Rp4.475.000,00<br>b. Belanja AC Split, Rp5.090.000,00 | 9,565,000.00 |
| | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | Belanja lemari, Rp5.450.000,00 | 5,450,000.00 |

Sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 326.200,00.

| Perkiraan | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| b. Belanja Aset Tetap Lainnya | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 100,00 | 0,- |

| No. | Perkiraan | Jenis Barang | Realisasi 2024 |
|---|---|---|---|
| **B** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | | **84.000.000,00** |
| | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | Berupa lukisan Rumah Gadang yang berada di Taman Budaya Sumatera Barat sejumlah 7 lukisan. Harga 1 lukisan Rp12.000.000,00 | 84.000.000,00 |

Tidak terdapat sisa anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

**5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA _____**

**5.2.1. Aset**

**Aset Lancar**

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **1. Beban Dibayar Dimuka** | **0,00,-** | **48.699.743,33,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00,- dimana saldo 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.699.743,33 yang merupakan premi asuransi Barang Milik Daerah. Hal ini dikarenakan Dinas Kebudayaan tidak lagi menganggarkan asuransi Barang Milik Daerah periode bulan November dan Desember 2024 untuk asuransi gedung dan kendaraan dinas.

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **2. Persediaan** | **206.824.595,00,-** | **2.661.000,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut :

| No | Persediaan Bahan Pakai Habis | Saldo awal 2024 (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | Saldo akhir 2024 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 379,000 | 107,423,790 | 103,872,095 | 3,930,695 |
| 2 | Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 990,000 | 50,651,900 | 47,881,100 | 3,760,800 |
| 3 | Persediaan Bahan Dokumen/Cetakan | 92,000 | 891,472,881 | 700,590,881 | 190,974,000 |
| 4 | Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | - | 70,332,300 | 67,379,800 | 2,952,500 |
| 5 | Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1,200,000 | 93,210,650 | 93,804,050 | 606,600 |
| 6 | Persediaan Sovenir/ Cendera Mata | - | 160,160,000 | 155,560,000 | 4,600,000 |
| | **TOTAL** | **2,661,000** | | | **206,824,595** |

Persediaan per 31 Desember adalah sebesar Rp206.824.595,00,- dimana pada persediaan tersebut terdapat Persediaan Bahan Dokumen/Cetakan yang berasal dari hutang belanja jangka pendek sebesar Rp 83.250.000,00,- dan tecatat dalam stock opname per 31 Desember 2024.

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka klasifikasi dan kodefikasi atas rekening keuangan di mapping kembali sesuai Permendagri tersebut. Untuk persediaan banyak kode akun yang berubah.

**Aset Tetap**

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **3. Tanah** | **69.681.500.000,00 -** | **69.681.500.000,00-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan tahun 2023.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran .17.

**1) Dasar Penilaian**

**a. Neraca Awal 2005** **Rp. 0,-**

**b. Harga Perolehan 2006 s/d 2022** **Rp. 0,-**

**c. Apraisal 2011** **Rp. 69.681.500.000,-**

Daftar Tanah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**2) Mutasi Tambah Kurang**

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | 69.681.500.000,- | 0,- | 0,- | 69.681.500.000,- |

| | |
|---|---|
| **Mutasi Tambah** | |
| Mutasi antar SKPD | 0,- |
| **Total Mutasi Tambah** | **0,-** |
| **Mutasi Kurang** | |
| **Total Mutasi Kurang** | **0,-** |
| **Total Mutasi** | **0,-** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **69.681.500.000,-** |

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **4. Peralatan dan Mesin** | **16.295.174.271,00** | **16.255.045.271,00** |

**-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan per 31 Desember 2024 dan tahun 2023. Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**1) Dasar Penilaian**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Neraca Awal 2005 | Rp. | 5.113.000,- |
| b. | Harga Perolehan 2006 s/d 2024 | Rp. 15.520.668.271,00,- | |
| c. | Apraisal 2011 | Rp. | 332.145.000,- |
| d. | Apraisal 2012 | Rp. | 128.140.000,- |
| e. | Apraisal 2013 | Rp. | 247.050.000,- |
| f. | Apraisal 2014 | Rp. | 62.058.000,- |

**2) Mutasi Tambah Kurang**

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Peralatan dan Mesin | 16.255.045.271,- | 40.129.000,- | 0 | 16.295.174.271,00 |

| | |
|---|---|
| **Mutasi Tambah** | |
| Belanja Modal tahun 2024 | 15,015,000.00- |
| Mutasi Antar SKPD | 25,114,000.00- |
| Barang dan Jasa yang dikapitalisir | 0,00- |
| **Total Mutasi Tambah** | **40.129.000,00-** |
| **Mutasi Kurang** | |
| Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin | 0,00- |

| | |
|---|---|
| Reklas ke Aset Tidak Bermafaat | 0,00- |
| Reklas ke Gedung dan Bangunan | 0,00- |
| Penghapusan | 0,00- |
| Belanja Modal Tidak Dikapitalisi | |
| **Total Mutasi Kurang** | **0,00-** |
| **Total Mutasi** | **40.129.000,00-** |
| **Saldo per 31 Des 2023** | **16.295.174.271,00-** |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 15,015,000,00- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

b) Mutasi antar SKPD sesuai Berita Acara Rekon Aset dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 14/NPD-SEKTR/BPKAD-2-24 tanggal 13 Februari 2024 sebesar Rp. 25,114,000.00-.

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **5. Gedung dan Bangunan** | **79.778.447.640,85,-** | **79.778.447.640,85** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan per 31 Desember 2024 dan tahun 2023. Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**1) Dasar Penilaian**

**a. Neraca Awal 2005** **Rp. 4.205.575.120,00,-**

**b. Harga Perolehan 2006 s/d 2024** **Rp. 75.572.872.520,85,-**

**2) Mutasi Tambah Kurang**

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Gedung dan Bangunan | 79.778.447.640,85,- | 0,00,- | 0,00,- | 79.778.447.640,85,- |

| | |
|---|---|
| **Mutasi Tambah** | |
| Belanja Modal tahun 2023 | 0,00- |
| Mutasi tambah | 0,00- |
| Barang dan Jasa yang dikapitalisir | 0,00- |
| **Total Mutasi Tambah** | **0,00-** |
| **Mutasi Kurang** | |
| Reklas ke Peralatan dan Mesin | 0,00- |
| **Total Mutasi Kurang** | **0,00-** |
| **Total Mutasi** | **0,00-** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **79.778.447.641,85,-** |

Terdapat Reklasifikasi Aset pada Gedung dan Bangunan yaitu dari akun taman ke Bangunan Gedung Kantor sebesar penambahan nilai Gedung dan Bangunan bertambah dengan penggabungan nilai Bangunan Gedung Kantor dengan

nilai Taman pada Museum Adityawarman sebesar Rp 193.739.000,00,00,-

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **6. Aset Tetap Lainnya** | **828.764.500,00** | **744.764.500,00** |

Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2024 menjadi Rp828.764.500,00,- yang dapat dilihat dalam bentuk KIB B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Adapun penambahan nilai Aset Tetap Lainnya.

**1) Dasar Penilaian**

**a. Neraca Awal 2005** **Rp. 100.077.000,00-**

**b. Harga Perolehan 2006 s/d 2024** **Rp. 728.687.500,00,-**

**2) Mutasi Tambah Kurang**

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Aset Tetap Lainnya | 744.764.500,00- | 84.000.000,00 | 0,00- | 828.764.500,00 |

| | |
|---|---|
| **Mutasi Tambah** | |
| Belanja Modal tahun 2024 | 84.000.000,00- |
| **Total Mutasi Tambah** | **84.000.000,00-** |
| **Mutasi Kurang** | |
| Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi | 0,00- |
| Reklas ke Aset Tidak Bermafaat | 0,00- |
| **Total Mutasi Kurang** | **0,00-** |
| **Total Mutasi** | **0,00-** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **828.764.500,00-** |

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 19 .

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **7. Kontruksi Dalam Pengerjaan** | **0,00-** | **0,00-** |

**1) Dasar Penilaian**

**a. Neraca Awal 2005** **Rp. 0,00-**

**b. Harga Perolehan 2006 s/d 2021** **Rp. 0,00-**

**2) Mutasi Tambah Kurang**

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kontruksi Dalam Pengerjaan | 0,00- | 0,00- | 0,00- | 0,00- |

| | |
|---|---|
| **Mutasi Tambah** | |
| **Total Mutasi Tambah** | **0,-** |
| **Mutasi Kurang** | |
| Penghapusan Aset Tetap | 0,- |
| **Total Mutasi Kurang** | **0,-** |

| | |
|---|---|
| **Total Mutasi** | **0,-** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **0,-** |

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **8. Akumulasi Penyusutan** | **27,237,504,870.75,-** | **24.094.711.124,32,-** |

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin Rp 13.704.366.077,02,-
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 13.491.238.793,69,-
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya Rp. 41.900.000,00,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2024 dan tahun 20232. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin | 12.218.743.821,64 | 1.485.622.255,42 | 0 | 13.704.366.077,06 |
| Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan | 11.834.067.302,68 | 1.731.179.490,61 | 74.007.999,60 | 13.491.238.793,69 |
| Akum. Penyusutan Aset Tetap lainnya | 41.900.000,00 | 0 | 0 | 41.900.000,00 |

| Uraian | Peralatan & Mesin | Gedung & Bangunan | Aset Tetap Lainnya |
|---|---|---|---|
| SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023 (NERACA RESTATEMENT) | 12.218.743.821,64 | 11.834.067.302,68 | 41.900.000,00 |
| JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | - | 1.731.179.490,61 | - |
| o Kurang Catat/tdk tercatat | - | - | - |
| o Koreksi - Saldo Awal | - | - | - |
| o Hibah dr Kementerian ESDM | - | - | - |
| o Mutasi antar SKPD | 25.144.000,00 | - | - |
| o Reklasifikasi | - | | - |
| o Koreksi BPK (Penyusutan KIB E Alat Musik Modern/ Band) | - | - | - |
| JUMLAH KOREKSI KURANG: | - | 74.007.999,60 | - |
| o Double Record | - | - | - |
| o Hibah | - | - | - |
| o Penghapusan | - | - | - |
| o Mutasi antar SKPD | - | - | - |
| o Koreksi - Kesalahan Berita Acara Mutasi | - | - | - |
| o Koreksi - Saldo Awal | - | 74.007.999,60 | - |
| o Reklas ke Aset Tidak Bermafaat | - | - | - |
| BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024 | 1.460.508.255,42 | - | - |
| SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024 | 13.704.366.077,06 | 13.491.238.793,69 | 41.900.000,00 |

**Aset Lain -lain**

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **9. Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat)** | **1.427.390.138,00** | **1.927.477.088,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan per 31 Desember 2024 dan tahun 2023. Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

**1) Dasar Penilaian**

**a. Neraca Awal 2005** **Rp. 0,-**

**b. Harga Perolehan 2006 s/d 2024** **Rp. 11.427.390.138,-**

**2) Mutasi Tambah Kurang**

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat) | 1.927.477.088,- | 0 | 500.086.950,- | 1.427.390.138,- |

| | |
|---|---|
| **Mutasi Tambah** | |
| Reklas dari Peralatan dan Mesin | 0,- |
| Reklas dari Aset Tetap Lainnya | 0,- |
| **Total Mutasi Tambah** | **0,-** |
| **Mutasi Kurang** | |
| Penghapusan | 500.086.950,- |
| **Total Mutasi Kurang** | **0,-** |
| **Total Mutasi** | **500.086.950,-** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **1.427.390.138,-** |

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 19 .

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **10. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya** | **1.382.860.138,00,-** | **1.882.947.088,00,-** |

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat Rp 1.382.860.138,00,-,-
  Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat) posisi 31 Desember 2024 dan tahun 2023. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Akum. Penyusutan Aset Lainnya ( Aset Tidak Bermafaat) | 1.882.947.088,00,- | 0,00,- | 500.086.950,00,- | 1.382.860.138,00 |

| Uraian | Aset Lainnya (Aset Tidak |
|---|---|

| | Bermanfaat) |
|---|---|
| SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023 (NERACA RESTATEMENT) | 1.882.947.088,00,- |
| JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | - |
| o Kurang Catat/tdk tercatat | - |
| o Hibah dr Pihak Ketiga | - |
| o Mutasi antar SKPD | - |
| o Reklasifikasi | - |
| o Koreksi BPK RI | |
| JUMLAH KOREKSI KURANG: | 500.086.950,00,- |
| o Double Record | - |
| o Hibah | - |
| o Penghapusan | 500.086.950,00,- |
| o Mutasi antar SKPD | - |
| o Reklasifikasi | - |
| o Koreksi - Saldo Awal | - |
| BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023 | - |
| SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024 | 1.382.860.138,00 |

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 18.

**5.2.2 Kewajiban**

**Kewajiban Jangka Pendek**

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **11. Utang Belanja** | **419.748.813,00** | **48.813.370,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2024 dan tahun 2023. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

1) Utang Belanja Pegawai Rp. 286.163.373,00

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Pegawai | 0,- | 286.163.373,00 | 0,- | 286.163.373,00 |

Yaitu utang Belanja TPP PNS berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja PNS untuk bulan Desember 2024 untuk 64 pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2024

2) Utang Belanja Barang dan Jasa Rp. 133.585.440,-

Yaitu utang belanja telpon dan listrik yang merupakan pemakaian bulan Desember 2024 serta hutang belanja cetak yang dibayarkan pada Tahun 2025

| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja Barang dan Jasa | 48.813.370,- | 134.010.440.00 | 49.238.370,00 | 133.585.440,- |

Penambahan terdiri dari :

1. Penambahan sebesar Rp83,250,000.00 merupakan utang belanja bahan cetak tahun 2024. Selengkapnya disajikan pada Lampiran13.
2. Yaitu utang belanja barang dan jasa untuk beban pemakaian listrik dan telpon tahun 2024 sebesar Rp134.010.440,00.
   Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

- Pengurangan sebesar Rp. 49.238.370,-
  Yaitu pembayaran utang belanja barang dan jasa untuk beban pemakaian listrik dan telepon tahun 2023.

**5.2.3 Ekuitas**

**Ekuitas**

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **12. Ekuitas** | **139.177.987.323,10** | **142.412.123.662,86,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan tahun 2023. Ekuitas ini terdiri dari:

| No | Uraian | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekuitas | 142,411,698,660.86 | 145,202,580,539.62 |
| 2 | Surplus/Defisit-LO | (34,906,523,787.76) | (41,969,663,823.76) |
| 4 | RK PPKD | 31,672,812,450.00 | 39,179,206,945.00 |
| | **JUMLAH EKUITAS** | **139,177,987,323.10** | **142,412,123,660.86** |

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

**5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)** _____

**5.3.1 PENDAPATAN-LO**

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **1. Pendapatan Retribusi-LO** | **355.448.000,00,-** | **276.092.000,00,-** |

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2024 dan tahun 2023.

Pendapatan ini terdiri dari:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 37.000.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO 318.448.000,00

**5.3.2 BEBAN**

**Beban Operasi**

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **a. Beban Pegawai** | **9.245.247.382,00** | **9.042.321.917,00,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2024 dan tahun 2023. Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan LO serta Beban tambahan penghasilan PNS-LO dan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LO yaitu :

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **A. Beban Gaji dan Tunjangan ASN** | **4.979.067.622,00** | **4.776.698.492,00** |
| Beban Gaji Pokok ASN | 3.651.659.036,00 | 3.588.830.068,00 |
| Beban Gaji Pokok PNS | 3.651.659.036,00 | 3.588.830.068,00 |
| Beban Tunjangan Keluarga ASN | 393.431.746,00 | 377.355.420,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Beban Tunjangan Keluarga PNS | 393.431.746,00 | 377.355.420,00 |
| Beban Tunjangan Jabatan ASN | 199.080.000,00 | 249.500.000,00 |
| Beban Tunjangan Jabatan PNS | 199.080.000,00 | 249.500.000,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional ASN | 87.860.000,00 | 35.420.000,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional PNS | 87.860.000,00 | 35.420.000,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN | 101.585.000,00 | 110.830.000,00 |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 101.585.000,00 | 110.830.000,00 |
| Beban Tunjangan Beras ASN | 207.266.040,00 | 220.881.000,00 |
| Beban Tunjangan Beras PNS | 207.266.040,00 | 220.881.000,00 |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 42.470.257,00 | 15.339.244,00 |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 42.470.257,00 | 15.339.244,00 |
| Beban Pembulatan Gaji ASN | 49.037,00 | 52.922,00 |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 49.037,00 | 52.922,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 265.661.202,00 | 149.056.066,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 265.661.202,00 | 149.056.066,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 7.501.304,00 | 7.358.458,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 7.501.304,00 | 7.358.458,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 22.504.000,00 | 22.075.314,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS | 22.504.000,00 | 22.075.314,00 |
| **B. Beban Tambahan Penghasilan ASN** | **3.926.255.260,00** | **4.002.908.425,00** |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 3.242.136.170,00 | 3.326.428.211,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 3.242.136.170,00 | 3.326.428.211,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 684.119.090,00 | 676.480.214,00 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 684.119.090,00 | 676.480.214,00 |
| **C. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | **339.924.500,00** | **262.715.000,00** |
| Beban Honorarium | 339.924.500,00 | 258.215.000,00 |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 339.924.500,00 | 258.215.000,00 |
| **D. Beban Jasa Pengelolaan BMD** | **0,00** | **4.500.000,00** |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 0,00 | 4.500.000,00 |
| | 9,245,247,382 | 9,042,321,917 |

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **b. Beban Barang & Jasa** | **22.899.044.659,33** | **29.972.960.773,01** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan tahun 2023. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Beban Barang | 3.248.217.310,00 | 4.600.042.993,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Beban Barang Pakai Habis | 3.248.217.310,00 | 4.600.042.993,00 |
| Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 2.550.000,00 | 1.393.200,00 |
| Beban Bahan-Bahan Kimia | 9.175.000,00 | 14.736.000,00 |
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 350.847.290,00 | 399.021.585,00 |
| Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 9.815.000,00 | 7.025.000,00 |
| Beban Bahan-Bahan Lainnya | 71.482.456,00 | 21.315.230,00 |
| Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 0,00 | 180.000,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 103.872.095,00 | 135.678.325,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 47.881.100,00 | 81.872.800,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 783.840.881,00 | 1.118.262.769,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 38.250.000,00 | 32.420.000,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 67.379.800,00 | 82.834.574,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2.293.549,00 | 1.830.000,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 32.670.800,00 | 64.797.700,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 7.200.000,00 | 9.000.000,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 155.560.000,00 | 323.950.000,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 93.804.050,00 | 239.360.810,00 |
| Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 20.600.000,00 |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat | 526.949.289,00 | 663.179.000,00 |
| Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 61.255.000,00 | 129.583.000,00 |
| Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 605.293.000,00 | 841.933.000,00 |
| Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 4.500.000,00 | 0,00 |
| Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 144.000.000,00 | 113.000.000,00 |
| Beban Pakaian Teknik | 0,00 | 46.000.000,00 |
| Beban Pakaian Kerja Laboratorium | 928.000,00 | 0,00 |
| Beban Pakaian Adat Daerah | 53.500.000,00 | 39.150.000,00 |
| Beban Pakaian Batik Tradisional | 65.670.000,00 | 85.100.000,00 |
| Beban Pakaian Olahraga | 0,00 | 114.320.000,00 |
| Beban Jasa | 15.064.344.449,33 | 16.642.596.292,01 |
| Beban Jasa Kantor | 11.042.865.279,00 | 10.717.413.210,00 |
| Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, | 690.850.000,00 | 927.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | |
| Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 163.979.770,00 | 0,00 |
| Beban Honorarium Rohaniwan | 16.600.000,00 | 13.200.000,00 |
| Beban Jasa Tenaga Laboratorium | 0,00 | 55.387.790,00 |
| Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1.112.400.000,00 | 542.700.000,00 |
| Beban Jasa Tenaga Administrasi | 66.326.256,00 | 66.126.256,00 |
| Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 22.491.592,00 | 153.453.502,00 |
| Beban Jasa Tenaga Ahli | 887.250.000,00 | 1.323.650.000,00 |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 886.604.364,00 | 849.730.800,00 |
| Beban Jasa Tenaga Keamanan | 1.204.395.841,00 | 1.243.805.530,00 |
| Beban Jasa Tenaga Supir | 197.892.301,00 | 177.679.535,00 |
| Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 232.250.000,00 | 287.800.000,00 |
| Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 36.000.000,00 | 0,00 |
| Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan | 0,00 | 2.400.000,00 |
| Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | 4.672.911.576,00 | 3.896.312.375,00 |
| Beban Jasa Kontribusi Asosiasi | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 0,00 | 5.250.000,00 |
| Beban Jasa Pengolahan Sampah | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 |
| Beban Jasa Jalan/Tol | 1.029.500,00 | 0,00 |
| Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 289.550.000,00 | 557.900.000,00 |
| Beban Tagihan Telepon | 2.471.110,00 | 2.435.096,00 |
| Beban Tagihan Listrik | 501.839.619,00 | 562.935.595,00 |
| Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 9.700.000,00 | 16.440.000,00 |
| Beban Paket/Pengiriman | 16.500.000,00 | 675.731,00 |
| Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10.961.350,00 | 11.068.000,00 |
| Beban Lembur | 8.562.000,00 | 10.663.000,00 |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 62.509.770,33 | 117.656.082,01 |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 6.703.454,00 | 9.214.716,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 403.119,00 | 1.387.858,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 6.703.454,00 | 8.666.221,00 |
| Beban Asuransi Barang Milik Daerah | 48.699.743,33 | 98.387.287,01 |
| Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 1.251.361.000,00 | 1.329.380.000,00 |
| Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 81.631.000,00 | 196.685.000,00 |
| Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 4.200.000,00 | 4.600.000,00 |
| Beban Sewa Mebel | 99.590.000,00 | 153.820.000,00 |
| Beban Sewa Alat Pendingin | 31.500.000,00 | 25.000.000,00 |
| Beban Sewa Peralatan Studio Audio | 78.000.000,00 | 0,00 |
| Beban Sewa Alat Studio Lainnya | 505.800.000,00 | 421.900.000,00 |
| Beban Sewa Sumber Tenaga | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Beban Sewa Peralatan Umum | 430.640.000,00 | 512.375.000,00 |
| Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 1.390.458.400,00 | 2.716.997.000,00 |
| Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor | 56.000.000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Beban Sewa Bangunan Gudang | 31.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 31.600.000,00 | 76.500.000,00 |
| Beban Sewa Taman | 9.800.000,00 | 0,00 |
| Beban Sewa Hotel | 1.261.558.400,00 | 2.610.497.000,00 |
| Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 0,00 | 24.000.000,00 |
| Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 129.900.000,00 | 26.000.000,00 |
| Beban Sewa Alat Musik | 111.900.000,00 | 20.000.000,00 |
| Beban Sewa Alat Peraga Kesenian | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.187.250.000,00 | 1.735.150.000,00 |
| Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 20.000.000,00 | 0,00 |
| Beban Bimbingan Teknis | 1.167.250.000,00 | 1.735.150.000,00 |
| Beban Pemeliharaan | 581.348.724,00 | 645.907.139,00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 189.999.850,00 | 387.557.029,00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 108.442.350,00 | 118.819.129,00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya | 485.000,00 | 0,00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 42.690.000,00 | 55.872.900,00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 9.637.500,00 | 166.880.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya | 0,00 | 9.970.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 16.780.000,00 | 25.550.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 11.965.000,00 | 8.965.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 391.348.874,00 | 258.350.110,00 |
| Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 391.348.874,00 | 258.350.110,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 3.389.144.176,00 | 7.163.855.349,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 3.367.638.842,00 | 5.891.230.382,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa | 3.367.638.842,00 | 5.750.080.382,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0,00 | 141.150.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri | 21.505.334,00 | 1.272.624.967,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri | 21.505.334,00 | 1.272.624.967,00 |
| Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan | 615.990.000,00 | 920.559.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | |
| Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 615.990.000,00 | 920.559.000,00 |
| Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 615.990.000,00 | 920.559.000,00 |
| | **22.899.044.659,33** | **29.972.960.773,01** |

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO adalah sebesar Rp71.116.782,00,- dan dapat dijelaskan sbb:

| Objek Belanja LRA/LO | Belanja Brg&Jasa LRA | Beban Brg&Jasa LO | Selisih +/- |
|---|---|---|---|
| Beban Barang Pakai Habis | 3248217310 | 3,369,130,905.00 | (120,913,595.00) |
| Beban Jasa Kantor | 11,042,865,279.00 | 11,041,768,209.00 | 1,097,070.00 |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 62,509,770.00 | 13,810,027.00 | 48,699,743.00 |
| Selisih | | | (71,116,782.00) |

Penjelasan selisih:

1. Selisih sebesar Rp 71.116.781,67 terdiri dari Beban Premi Asuransi sebesar Rp. 46.699.743,00,-
2. Penyesuaian persediaan sebesar Rp. 204.163.595,00,- dimana terdapat pengakuan hutang LS sebesar Rp.83.250.000,00,-
3. Beban listri dan telepon Rp. 1,097,070.00,-

| Perkiraan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **c. Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **3.117.679.746,43,-** | **3.230.473.133,75,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2024 Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

| | Uraian | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| - | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1.460.508.255,42 | 1.573.301.642,88 |

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris Dinas Kebudayaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17 dan 18.

**5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

| URAIAN | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 1. EKUITAS AWAL | 142,412,123,660.86 | 143,481,094,882.15 |
| Koreksi Ekuitas | -425,000.00 | 1,721,485,657.47 |
| 2. RK PPKD | 31,672,812,450.00 | 39,179,206,945.00 |
| 3. Surplus/Defisit LO | -34,906,523,787.76 | -41,969,663,823.76 |
| 4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar | | |
| 5. Ekuitas Akhir | **139,177,987,323.10** | **142,412,123,660.86** |

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp 142,412,123,660.86,- adalah saldo ekuitas berdasarkan neraca 31 Desember 2023.
2. Koreksi Ekuitas sebesar Rp 425,000.00 adalah belanja hutang bulan Desember 2024 berupa denda belanja jasa kantor - tagihan telepon sebesar Rp35.000,00,- dan belanja jasa kantor - tagihan listrik sebesar Rp390.000,00,-
3. RK PPKD sebesar Rp 31,672,812,450.00,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2024 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Surplus Defisit LO sebesar Rp 34,906,948,787.76,- adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2024.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp 139,177,562,323.10,- adalah saldo Ekuitas Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024.

## 5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2017 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

| Jenis Pendapatan/ Belanja | LRA | LO | Selisih |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | | | |
| 1. Pendapatan Pajak | - | - | - |
| 2. Pendapatan Retribusi | 355,448,000.00 | 355,448,000.00 | 0,00 |
| 3. Lain-lain PAD Yg Sah | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan | 355,448,000.00 | 355,448,000.00 | 0,00 |
| 1. Belanja Pegawai | 8,959,084,009.00 | 9.245.247.382,00 | 286.163.373,00 |
| 2. Belanja Brg & Jasa | 22,970,161,441.00 | 22,899,044,659.33 | 71.116.782,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 4. Belanja Modal | 99,015,000.00 | 0 | 99,015,000.00 |
| 5. Beban Penyusutan & Amortisasi | 0 | 3.117.679.746,43 | (3.117.679.746,43) |
| 6. Beban Penyisihan Piutang | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah Beban Operasi** | **31,929,245,450.00** | **32.144.292.041,33** | **215.046.591,33** |

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

## BAB VI
## PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 6.1 Tugas Pokok dan Fungsi _____

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 6.2 Struktur Organisasi _____

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Koordinator Program dan Keuangan;
3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, terdiri dari :
   a. Sub Koordinator Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya
4. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman, terdiri dari :
   a. Sub Koordinator Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi, terdiri dari :
   a. Sub Koordinator Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD):
   a. UPTD. Museum Nagari Adityawarman
   b. UPTD. Taman Budaya

**A. Tugas Pokok dan Fungsi dari Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala UPTD**

**1. Sekretaris**

Sekretarias mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan dilingkungan Dinas;
b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Dinas;
c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas;
e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;

f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**2. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya**

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan pelaksanaan urusan kebudayaan bidang kesenian dan diplomasi budaya, pada aspek seni tradisi, seni modern dan diplomasi budaya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan peyusunan rencana operasional bidang kesenian dan diplomasi budaya berdasarkan program kerja kepala dinas;
b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis diplomasi budaya, seni tradisionaldan seni non tradisi;
c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar dan kriteria diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan diplomasi budaya;
f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seni tradisional;
g. pengkoordinasian pelaksanakan kegiatan seni non tradisi;
h. pengkoordinasian pelaksanakan pemberian apresiasi kepada pelaku;
i. pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian dan diplomasi budaya;
j. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi diplomasi budaya, seni tradisional dan seni non tradisi;
k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional, seni non tradisi dan perfilman serta sarana dan prasarana;
l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual seni tradisional, seni non tradisi dan perfilman;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesenian dan diplomasi budaya; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**3. Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman**

Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi urusan bidang Warisan Budaya Takbenda, Cagar Budaya dan Permuseuman. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang warisan budaya tak benda, cagar budaya, dan permuseuman;
b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang warisan budaya tak benda, cagar budaya, dan permuseuman;
c. pelaksanaan penetapan Warisan Budaya Takbenda peringkat Daerah;
d. pelaksanaan pencatatan, pengusulan penetapan warisan budaya tak benda peringkat Daerah (Provinsi);
e. pelaksanaan pengelolaan warisan budaya tak benda;
f. melaksnakan pendaftaran cagar budaya tingkat daerah (provinsi);
g. pelaksanaan pelindungan dan pelestarian (pengembangan dan pemanfaatan) cagar budaya;
h. pelaksanaan pengawasan pelestarian cagar budaya;
i. memberikan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
j. pelaksanaan pemberian izin pendirian museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
k. pelaksanaan administrasi penggabungan, pemecahan, pembubaran dan pengalihan kepemilikan museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan museum yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang cagar budaya, warisan budaya serta permuseuman; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**4. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi**

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang sejarah, adat dan nilainilai tradisi;
c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sejarah, adat dan nilai tradisi;
e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan norma, standar,
f. prosedur dan kriteria di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah;
h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai tradisi yang terdiri dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai tradisi;
i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi pemangku adat;
j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendokumentasian di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi;
l. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah lokal;
m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, penulisan, revitalisasi dan fasilitasi sejarah lokal;
n. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
o. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan penguatan nilai-nilai tradisi;
p. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku pelestarian nilai-nilai tradisi;
q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Nagari Adityawarman**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 35 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang bidang perawatan benda cagar budaya dan permuseuman dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di pengelolaan permuseuman di Sumatera Barat. Untuk melaksanakan tugas UPTD Museum Adityawarman, mempunyai fungsi:

a. Penelitian, pengkajian, pengumpulan, pengembangan, dan
b. Pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
c. Pelaksanaan registrasi dan herregistrasi koleksi museum;
d. Pelaksanaan pengamanan, perlindungan dan pendokumentasian
e. Koleksi museum;
f. Pelaksanaan layanan bimbingan, edukasi, dan promosi koleksi Museum;
g. Pelaksanaan kemitraan dan pemasaran dalam penyebarluasan
h. Informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas museum;
i. Pelaksanaan pameran koleksi museum;
j. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

**6. Unit Pelaksana Teknis (UTD) Taman Budaya**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan, pelestarian dan pengembangan Seni Budaya daerah. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional Taman Budaya;
b. pelaksanaan pengkajian dan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya;
c. pelaksanaan pergelaran/pementasan, pameran, kompetisi (lomba dan festival) karya seni budaya;
d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kegiatan Taman Budaya;
e. pelaksanaan publikasi dan pendokumentasian aktivitas seni budaya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan unit kerja terkait;
g. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi ketata usahaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**B. Aspek Stratejik**

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 **Visi** Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam **RPJMD 2016-2021** adalah **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah **Misi ke 2** yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik *Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*".** Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

*Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

Operasionalisasi dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dijabarkan dalam Tujuan **"Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat"** dan Sasaran yang ingin dicapai diantaranya :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK;
2. Meningkatnya budaya Literasi, dan
3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ditinjau dari fungsi kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya pelestarian, gelar seni budaya, pemberdayaan, pengembangan, dan pemanfaatan seni-budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan program tersebut sebagai kiprah untuk menumbuh-kembangkan serta menghimpun berbagai temuan, informasi, partisipasi dan aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat seni-budaya agar dapat mengukur capaian dari target kinerja sektor kebudayaan yang ada di Sumatera Barat.

Pengembangan dan pemeliharaan tiap jenis kesenian khususnya kesenian tradisi tidak semudah dengan pengembangan kesenian kontemporer, beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

1. Belum cukup tersedianya gedung pertunjukkan seni budaya yang representative;
2. Belum seluruh lingkup seni dan komunitas budaya terakomodir dalam pengembangan dan apresiasi karya seni yang telah dibuat;
3. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan seni budaya diantaranya:

1. Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai kawasan seni dan Budaya;
2. Tingkat kesadaran pelaku seni dan budaya terhadap legalitasnya masih kurang;
3. Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingan;
4. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap Seni Budaya Daerah;
5. Pengaruh budaya luar (westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi.

## C. Sumber Daya Manusia

Berikut rekap jumlah pegawai Dinas Kebudayaan berdasarkan kategori tertentu per 31 Desember 2024:

**Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin**

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-Laki | 47 Orang |
| Perempuan | 21 Orang |
| **Total** | **68 Orang** |

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

| No | Jenis golongan/Ruang | Jumlah | Persentase% |
|---|---|---|---|
| 1 | IV/d | 1 | 0.64 |
| 2 | IV/c | 1 | 0.64 |
| 3 | IV/b | 2 | 1.28 |
| 4 | IV/a | 8 | 5.12 |
| 5 | III/d | 18 | 11.52 |
| 6 | III/c | 7 | 4.48 |
| 7 | III/b | 13 | 8.32 |
| 8 | III/a | 0 | 0 |
| 9 | II/d | 4 | 2.56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | II/c | 5 | 3.2 |
| 11 | II/b | 4 | 2.56 |
| 12 | II/a | 0 | 0 |
| 13 | I/b | 1 | 0.64 |
| | **JUMLAH** | **64** | **40.96** |

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

| JABATAN | JUMLAH |
|---|---|
| Esselon I | 0 |
| Esselon II | 1 |
| Esselon III | 6 |
| Esselon IV | 7 |
| Analasi Kebijakan Ahli | 3 |
| Perencana Ahli Muda | 1 |
| Pamong Budaya Ahli | 2 |
| Pamong Budaya Ahli | 5 |
| Pamong Budaya Ahli | 1 |
| **Jumlah** | **26 Orang** |

**Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan**

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah | Persentase% |
|---|---|---|---|
| 1 | SD (Sekolah Dasar) | 1 | 0.64 |
| 2 | SMP/Sederajat | 1 | 0.64 |
| 3 | SMA/Sederajat | 20 | 12.8 |
| 4 | Sarjana Muda (D-3) | 3 | 1.92 |
| 5 | Perguruan Tinggi (S1) | 25 | 16 |
| 6 | Perguruan Tinggi (S-2) | 14 | 8.96 |
| | **JUMLAH** | **64** | **40.96** |

## BAB VII
## PENUTUP

### 7.1 Kesimpulan _____

Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 6 (Enam) Program dengan 16 (enam belas) kegiatan serta dengan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Dalam pencapaian target telah ditetapkan terdapat kendala-kendala yang menyebabkan target tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,01% target keuangan yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya efesiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

a. Dalam Tahun Anggaran 2024, Dinas Kebudayaan Belanja Daerahnya sebesar Rp. 33.931.381.189,03,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 33.832.039.989,03,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 99.341.200,00,- dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 32.028.260.450,00,- (94,39%), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 31.929.245.450,00,- (94,38%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 99.015.000,00,- (99,67%) dari jumlah anggaran.
b. Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.206.824.595,00,- yang terdiri dari Alat Tulis Kantor sebesar Rp.3.930.365,00,-, Kertas dan Cover sebesar Rp.3.760.800,00,-, Bahan Cetak sebesar Rp.190.974.000,00,-, Bahan Komputer sebesar Rp.2.952.500,00,-, Souvernir / Cendra Mata sebesar Rp.4.000.000,00,- dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp.606.600,00,-
c. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah berupa Utang Belanja sebesar Rp. 419.748.813,00,- yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 286.163.373,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 133.585.440,00,-. Adapun Utang Belanja Pegawai berupa Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN diantaranya Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS bulan Desember 2024 sebesar Rp. 227.339.173,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN/Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS bulan Desember 2024 sebesar Rp. 49.546.704,00. Untuk Utang Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Utang Belanja Barang berupa Utang Belanja Barang Pakai HabisAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak sebesar Rp. 83.250.000,00,- dan Utang Belanja Jasa berupa Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp. 375.095,00,- dan Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik Bulan Desember sebesar Rp. 49.960.345,00,-
d. Untuk tahun 2024 Aset yang mengalami perubahan adalan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya berupa Aset lain-lain.

### 7.2 Saran _____

1. Perlu ditingkatkan Perencanaan yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Perlunya penambahan Staf dibidang Akuntansi.

# DAFTAR LAMPIRAN

| NO | URAIAN |
|---|---|
| 1.a | DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2024 |
| 1.b | DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2024 DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD TAHUN 2024 |
| 2 | DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN LRA TAHUN 2024 |
| 3 | LRA, LO, NERACA DAN LPE SKPD TAHUN 2024 DARI APLIKASI SIPD |
| 4 | LRA SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 |
| 5 | DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA TAHUN 2024 (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN GU,TU,LS |
| 6 | DAFTAR PENYETORAN KEMBALI TAHUN 2024 BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN JENIS BELANJA |
| 7 | DAFTAR PIUTANG PAJAK & PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 8 | DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 9 | DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 10 | DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER 31 DESEMBER 2024 (Tidak Termasuk Sewa Rumah Dinas) |
| 11 | DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 12 | DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK TAHUN 2024 |
| 13 | DAFTAR HUTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 14 | DAFTAR PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA RUMAH DINAS TAHUN 2024 |
| 15 | DAFTAR INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR) BESERTA PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR PER 31 DESEMBER 2024 |
| 16 | DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024 |
| 17 | DAFTAR ASET TETAP BESERTA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024 |
| 18 | DAFTAR ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2022 BESERTA AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2024 |
| 19 | DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 20 | DAFTAR KIB. F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN |
| 21 | DAFTAR BELANJA MODAL TAHUN 2024 |
| 22 | DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISIR TAHUN 2024 |
| 23 | DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIKAPITALISIR 2024 |
| 24 | DAFTAR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD TAHUN 2024 |
| 25 | REGISTER SP2D SPKD TAHUN 2024 |
| 26.a | DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD – KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN DINKES PROVINSI SUMBAR |
| 26.b | DAFTAR LAPORAN OPERASIONAL BLUD – KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN DINKES PROVINSI SUMBAR |
| 27 | PENJELASAN PERBEDAAN LRA DAN LO |
| 28 | JURNAL PENYESUAIAN TAHUN 2024 |
| 29 | LAMPIRAN LAINNYA:<br>1) Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) bulan Desember 2024<br>2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2024<br>3) Berita Acara Opname Kas bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024<br>4) Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024<br>5) Bank Statement untuk saldo rekening bendahara pengeluaran di Bank per tanggal 31 Desember 2024<br>6) Berita Acara Opname Kas bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024<br>7) Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024<br>8) Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2024 |

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Disamping itu, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023, dan (e) Laporan Perubahan Ekuitas telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Padang, Desember 2024

**Kepala Dinas Kebudayaan**
**Provinsi Sumatera Barat**

**Dr. H. Jefrinal Arifin, SH. M.Si**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196512121991121001

**DAFTAR ISI**


| | | Halaman |
|---|---|---|
| **KATA PENGANTAR** | | **i** |
| **DAFTAR ISI** | | **ii** |
| **DAFTAR LAMPIRAN** | | **iii** |
| **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB** | | **iv** |
| **LAPORAN REALISASI ANGGARAN** | | **v** |
| **LAPORAN OPERASIONAL** | | **vi** |
| **NERACA** | | **vii** |
| **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS** | | **vii** |
| **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN** | | |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** | |
| 1.1 | Informasi Umum | 1 |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan | 2 |
| 1.3 | Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan | 5 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan | 7 |
| **BAB II** | **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD** | |
| 2.1 | Ekonomi Makro | 9 |
| 2.2 | Kebijakan Keuangan | 9 |
| 2.3 | Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD | 10 |
| **BAB III** | **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN** | |
| 3.1 | Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan | 15 |
| 3.2 | Hambatan dan Kendala yang dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan | 29 |
| **BAB IV** | **KEBIJAKAN AKUNTANSI** | |
| 4.1 | Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah | 32 |
| 4.2 | Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan | 33 |
| 4.3 | Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 34 |
| 4.4 | Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah | 39 |
| **BAB V** | **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN** | |
| 5.1. | Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | 40 |
| 5.1.1. | Penjelasan Pos Pos Pendapatan | 40 |
| 5.1.2. | Penjelasan Pos Pos Belanja | 41 |
| 5.2. | Penjelasan Neraca | 48 |
| 5.2.1. | Aset | 48 |
| 5.2.2. | Kewajiban | 59 |
| 5.2.3. | Ekuitas | 61 |
| 5.3. | Penjelasan Laporan Operasional (LO) | 61 |
| 5.3.1 | Pendapatan LO | 61 |
| 5.3.2 | Beban | 62 |
| 5.4. | Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas | 69 |
| 5.5. | Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas | 69 |
| **BAB VI** | **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD** | |

**BAB VII PENUTUP**
**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# DAFTAR LAMPIRAN

| NO | URAIAN |
|---|---|
| 1.a | DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2024 |
| 1.b | DAFTAR REALISASI SP2D, SPJ DAN SISA UYHD TAHUN 2024 DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD TAHUN 2024 |
| 2 | DAFTAR REKAPITULASI PENDAPATAN LRA SKPD TAHUN 2024 |
| 3 | LRA, LO, NERACA DAN LPE SKPD TAHUN 2024 DARI APLIKASI SIPKD |
| 4 | LRA SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 |
| 5 | DAFTAR PENYETORAN KEMBALI BELANJA TAHUN 2024 (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN GU,TU,LS |
| 6 | DAFTAR PENYETORAN KEMBALI TAHUN 2024 BELANJA (CONTRA POST BELANJA) BERDASARKAN JENIS |
| 7 | DAFTAR PIUTANG PAJAK & PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 8 | DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 9 | DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAN PENYISIHANNYA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 10 | DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PER 31 DESEMBER 2024 (Tidak Termasuk Sewa Rumah Dinas) |
| 11 | DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 12 | DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK TAHUN 2024 |
| 13 | DAFTAR HUTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 14 | DAFTAR PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA RUMAH DINAS TAHUN 2024 |
| 15 | DAFTAR INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR) BESERTA PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR PER 31 DESEMBER 2024 |
| 16 | DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024 |
| 17 | DAFTAR ASET TETAP BESERTA AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024 |
| 18 | DAFTAR ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023 BESERTA AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER |
| 19 | DAFTAR REKAPITULASI NILAI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2024 |
| 20 | DAFTAR KIB. F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN |
| 21 | DAFTAR BELANJA MODAL TAHUN 2024 |
| 22 | DAFTAR BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISIR TAHUN 2024 |
| 23 | DAFTAR BELANJA BARANG DAN JASA YANG DIKAPITALISIR 2024 |
| 24 | DAFTAR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SKPD TAHUN 2024 |
| 25 | REGISTER SP2D SPKD TAHUN 2024 |
| 26.a | DAFTAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD – KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN DINKES PROVINSI SUMBAR |
| 26.b | DAFTAR LAPORAN OPERASIONAL BLUD – KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN DINKES PROVINSI SUMBAR |
| 27 | PENJELASAN PERBEDAAN LRA DAN LO |
| 28 | JURNAL PENYESUAIAN TAHUN 2024 |
| 29 | LAMPIRAN LAINNYA:<br>1) Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) bulan Desember 2024<br>2) Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2024<br>3) Berita Acara Opname Kas bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024<br>4) Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024<br>5) Bank Statement untuk saldo rekening bendahara pengeluaran di Bank per tanggal 31 Desember<br>6) Berita Acara Opname Kas bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 |

7) Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024
8) Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2024

# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023, dan (e) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Desember 2024

**Kepala Dinas Kebudayaan**
**Provinsi Sumatera Barat**

**Dr. H. Jefrinal Arifin, SH. M.Si**
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196512121991121001